

ISLAM DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP CINA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS UIGHUR

Enika Maya Oktavia¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

Email: 21103070004@student.uin-suka.c.id

Abstract: *Indonesia is faced with a foreign policy dilemma regarding the Uighur conflict. Despite its strategic relationship with China, Indonesia, as an Islamic country, places the protection of the rights of Uighur Muslims as a priority. The limitations of direct action against China arise from geopolitical considerations, economic interests, and the complexity of bilateral relations. Indonesia plays an active role in international forums, such as the OIC and the UN, to fight for the rights of Uighur Muslims, while Islam becomes the moral basis of foreign policy. Economic challenges, relationship complexity, and limited resources are factors that affect policy implementation. The research methodology uses a qualitative approach, with data tracing through literature studies to analyze the phenomenon of the Uighur conflict. Overall, Indonesia's policy reflects political, economic, and moral considerations in responding to the Uighur conflict with China, using a soft diplomacy approach. Diplomacy that avoids confrontation and is influenced by the balance of power and international capabilities.*

Keywords: *Foreign Policy; Islam; Ethnic Uighur.*

Abstrak: *Indonesia dihadapkan pada dilema kebijakan luar negeri terkait konflik Uighur. Meskipun menjalin hubungan strategis dengan Cina, Indonesia, sebagai negara berbasis Islam, menempatkan perlindungan hak-hak Muslim Uighur sebagai prioritas. Keterbatasan tindakan langsung terhadap Cina timbul dari pertimbangan geopolitik, kepentingan ekonomi, dan kompleksitas hubungan bilateral. Indonesia berperan aktif di forum internasional, seperti OKI dan PBB, untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Uighur, sementara Islam menjadi dasar moral dalam kebijakan luar negeri. Tantangan ekonomi, kompleksitas hubungan, dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data tracing melalui studi kepustakaan untuk menganalisis fenomena konflik Uighur. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia mencerminkan pertimbangan politik, ekonomi, dan moral dalam menanggapi konflik Uighur dengan Cina, dengan menggunakan pendekatan diplomasi lunak. Diplomasi yang menghindari konfrontasi dan dipengaruhi oleh keseimbangan power dan kapabilitas internasional.*

Kata Kunci: *Kebijakan Luar Negeri; Islam; Etnis Uighur.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dengan lebih dari 88% dari populasi 264 juta orang memeluknya. Islam telah lama memainkan peran penting dalam legitimasi politik Indonesia, dan telah menjadi semakin penting dalam kebijakan luar

negeri Indonesia sejak era reformasi.¹ Karena kebijakan luar negeri secara umum mencerminkan nilai-nilai kenegaraan, diasumsikan bahwa Islam telah lama diintegrasikan ke dalam hubungan luar negeri Indonesia. Selama era Suharto (1965-1998), politik Islam ditindas dan dilarang dari kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa kebangkitan Islam politik di Indonesia. Para pembuat kebijakan percaya bahwa mempromosikan Islam moderat di luar negeri akan membantu memperkuat tradisi moderat Indonesia dan melemahkan pengaruh ekstremis di mana demokrasi Indonesia, reputasi toleransi, dan bentuk Islam moderat dipersepsikan sebagai aset lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kebijakan luar negeri.

Namun, penggunaan Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia tetap kontroversial. Banyak pemimpin Indonesia - baik sekuler maupun Muslim - percaya bahwa menggunakan agama dalam kebijakan luar negeri akan memberdayakan kaum radikal, bukan moderat. Selain itu, pemerintah Indonesia harus berhati-hati untuk tidak mengambil posisi yang menimbulkan konflik di dalam negeri, mengingat umat Islam Indonesia tidak monolitik. Kebangkitan politik Islam merupakan ciri khas era reformasi Indonesia. Sebagaimana para pembuat kebijakan percaya bahwa mempromosikan demokrasi memperkuat reformasi politik di dalam negeri, beberapa pembuat kebijakan percaya bahwa menampilkan citra Islam moderat di luar negeri menciptakan "putaran umpan balik" yang kuat dan membantu memperkuat tradisi moderat Indonesia. Namun setelah Bom Bali tahun 2002 mengungkapkan ancaman teroris yang berkembang di dalam negeri, banyak pemimpin Indonesia - baik sekuler maupun Muslim - percaya bahwa menggunakan agama dalam kebijakan luar negeri akan memberdayakan kaum radikal, bukan moderat. Azumardi Azra menggambarkan peran Islam dalam kebijakan luar negeri sebagai "ambigu".² Ambiguitas tersebut menunjukkan bahwa sementara pemerintah menaruh perhatian pada isu-isu dengan ikatan Muslim yang kuat, pemerintah meremehkan karya Islam yang terkait dengan isu-isu tersebut.

Tidak jelas bagaimana peningkatan fanatisme agama akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan. Argumen semacam itu juga ditujukan kepada publik. Upaya untuk mempromosikan Indonesia sebagai masyarakat yang demokratis, toleran, dan modern di luar negeri memperkuat nilai-nilai tersebut di dalam negeri, melemahkan pengaruh ekstremis. Namun, dengan bangkitnya mayoritas Muslim, politik dalam negeri Indonesia menjadi kurang toleran terhadap nilai-nilai liberal dan minoritas, sehingga mengikis kredibilitas citra internasional Indonesia sebagai masyarakat Muslim moderat.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Indonesia mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan Islam moderat di dunia internasional. Yudhoyono berpendapat bahwa Indonesia memiliki otoritas untuk berbicara tentang tantangan yang dihadapi dunia Muslim, karena pengalamannya dengan pembangunan ekonomi, reformasi politik, dan terorisme Islam. Dalam pidatonya di Arab Saudi, Yudhoyono meninjau banyak masalah yang dihadapi komunitas Muslim, termasuk "Islamophobia," dan berpendapat bahwa umat Islam harus merespon dengan merangkul "teknologi dan modernitas dan budaya

¹ Feillard, A. (1999). *NU Vis a Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna*. LKiS Pelangi Aksara.

² Azra, A. (2016). *Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi*. Kencana, hlm. 10.

keunggulan.”³ Memperhatikan bahwa Islam bukan hanya agama perdamaian tetapi juga agama kemajuan, Yudhoyono menyerukan kebangkitan umat Islam dan mendesak Ikhwanul Muslimin untuk merangkul globalisasi, menjangkau non-Muslim dan melawan terorisme bersama. Pendapat tentang isu-isu yang berkaitan dengan Islam bisa menjadi penghambat kebijakan luar negeri Indonesia. Ketika Amerika Serikat memindahkan kedutaannya dari Israel ke Yerusalem, kedutaan besar Amerika di Indonesia menjadi tempat protes jalanan besar-besaran. Demikian pula, Indonesia keberatan dengan pernyataan Australia pada Desember 2018 tentang niatnya untuk mengikuti Amerika Serikat dan menunda penandatanganan perjanjian perdagangan bebas. Melalui *platform* pemilu mendukung rakyat Palestina, sambil menyerukan bahwa Indonesia mempromosikan bentuk Islam yang moderat, Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kampanye demokrasi dilakukan melalui berbagai misi. Pernyataan misi menyebutkan dialog antaragama sebagai *platform* untuk mempromosikan *soft power* Indonesia, tetapi selalu terpinggirkan dalam politik Indonesia.

Solidaritas umat Islam tercermin dalam politik konflik di mana umat Islam menjadi korban diskriminasi dan kekerasan akibat islamophobia. Kehendak ini secara tradisional telah diungkapkan secara luas dalam kebijakan Indonesia terhadap Timur Tengah, termasuk mendukung kemerdekaan Palestina, menentang invasi Afghanistan tahun 2001, menentang perang Irak tahun 2003 dan mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap Libanon dan Gaza.⁴ Baru-baru ini, telah mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap Etnis Uighur di Cina. Etnis Uighur adalah mayoritas Muslim yang tinggal di provinsi Xinjiang menjadi isu tersendiri bagi Cina untuk ditanggapi secara serius, terutama setelah etnis Uighur mendeklarasikan wilayahnya terpisah dari Cina dan mengakuinya sebagai bagian dari Turkestan Timur. (gagasan pan-Turki atau nasionalisme Uighur; non-Cina). Bahkan, pada tahun 1940-an, para pemimpin Etnis Uighur mengakui kesatuan wilayah dan setuju untuk mengakui Cina sebagai pemimpin mereka.⁵

Hal yang membuat konflik Uighur di Xinjiang ini menjadi viral di media karena disebutkan telah terjadi pembantaian muslim Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Hal itu terjadi sejak munculnya video keprihatinan yang digawangi oleh aktivis Uighur di Amerika Serikat, hingga berlanjutnya demonstrasi yang mengutuki kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan Cina terhadap Uighur.⁶ Namun dari situasi ini, sikap wakil pemerintah Indonesia justru hanya turut menyampaikan keprihatinannya kepada Duta Besar Cina di Jakarta.⁷

³ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pidato di Islamic University of Iman Muhammad Bin Sa'ud, Riyadh, Saudi Arabia. <https://ex.kemlu.go.id/en/pidato/presiden/Pages/Remarks-By-HE-Dr.-H.-Susilo-BambangYudhoyono-President-of-the-Republic-of-Indonesia-at-Islamic-Un.aspx> diakses pada 15 Maret 2023.

⁴ Sukma, Rizal. *Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia*. London: Routledge, 2004, hal. 117.

⁵ CNN Indonesia, Riva Dessthania Suastha, *ISISUighur: Darah Bakal Mengalir di Sungai Cina*, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170303130505-113-197586/isis-uighur-darah-bakal-mengalir-di-sungai-Cina>. Diakses pada

⁶ Gita Karisma, *Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Cina Terhadap Keutuhan Wilayah*, *Jurnal Sosiologi*, Volume 19, No. 1, hal. 44

⁷ Tempo.co, *Mengapa Pemerintah Negara Muslim, Termasuk Indonesia Diam Soal Uighur?*, <https://www.tempo.co/abc/3377/mengapa-pemerintah-negara-muslim-termasuk-indonesia-diam-soal-uyghur>. Diakses pada

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai bagaimana Islam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam menangani konflik pengungsi Etnis Uighur. Dua pertanyaan kunci diajukan untuk mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, bagaimana bentuk peran Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Uighur? *Kedua*, apakah peran tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional dan Hukum Islam? Penelitian ini akan menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani isu kemanusiaan yang melibatkan etnis Uighur, menciptakan gambaran yang komprehensif tentang dampak dan implikasi kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik tersebut.

Kondisi Ekosopol di Xinjiang dan Sejarah Singkat Hubungan RI-Cina

Etnis Uighur atau *Xinjiang Uighur Autonomous Region* (XUAR) adalah etnis minoritas di Cina yang menganut Islam dengan keyakinan Sunni. Etnis Uighur berasal dari masyarakat Turki primitif, dimana terdapat kesamaan etnis dan budaya, sehingga Etnis Uighur menganggap Cina sebagai orang asing. Etnis Uighur tinggal di wilayah Xinjiang, terletak di Cina bagian barat, berbatasan langsung dengan negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan.⁸

Pada tahun 1940 (*The Uighur American Association*), Turkestan Timur adalah negara merdeka dengan beragam medan seperti pegunungan, gurun, sungai, dan sumber daya alam yang kaya.⁹ Dahulu, Turkestan Timur diduduki oleh Etnis-Etnis yang berasal dari Asia Tengah, seperti Etnis Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Karena letaknya yang strategis, kawasan ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk pertukaran ekonomi dan budaya. Kemudian, pada tahun 1876, terjadi invasi Dinasti Qing dari Tiongkok untuk menaklukkan wilayah Xinjiang yang akhirnya menjadi bagian dari wilayah Tiongkok. Sejak akses wilayah Turkestan Timur atau wilayah yang sekarang dikenal sebagai Xinjiang, pemerintah beralih ke komunisme dan memiliki keterbatasan karena perbedaan budaya yang ada. Etnis Uighur secara kultural harus bertahan dalam arus globalisasi yang begitu cepat akibat perbedaan etnis. Xinjiang dianggap sebagai salah satu daerah "otonom" Cina di bawah pemerintahan Komunis Cina. Provinsi Xinjiang membangun ekonominya dengan sangat cepat karena didukung oleh infrastruktur. Sejak wilayah Xinjiang diimpor ke Cina, pemerintah Cina fokus untuk mencapai keseimbangan populasi atau keseimbangan populasi antara kelompok etnis Uighur dan Han. Karena adanya program keseimbangan demografis dan sulitnya menerima heterogenitas budaya, pemerintah Cina telah melakukan banyak praktik diskriminatif.¹⁰

⁸ Hidayat, Muhammad Nizar. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Interdependence Journal*, 1, 3.

⁹ Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah, "Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10 (Oktober 2020): 1217.

¹⁰ Firsty Adinda Putri and Gonda Yumitro, "Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang," *Balcony: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Budi Luhur* 1, no. 6 (2022) : [15-22], <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/266/151>.

1. Bentuk-Bentuk Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang Program Migrasi

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penduduk bumi yang multikultur, multiras, dan multi-etnik. Sebagaimana dalam firman Allah berikut :

Q.S Ar Rum [30]: 22

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافُ السِّنِّيَّاتِ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

22. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Q.S Al Hujarat [49]: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Keberagaman penduduk yang ada di seluruh penjuru dunia merupakan hal yang menarik dan menjadi objek kajian yang menarik untuk dipelajari. Meskipun demikian, tidak semua orang melihat perbedaan-perbedaan tersebut sebagai keindahan atau pelengkap. Perbedaan dan keanekaragaman bahasa di seluruh dunia mendorong manusia untuk memahami lebih lanjut tentang bahasa-bahasa yang berbeda dengan yang mereka gunakan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa interaksi atau komunikasi dengan individu atau kelompok lain. Setiap individu memerlukan sosialisasi untuk mencapai tujuan hidupnya.¹¹

Dalam masyarakat multikultural, pemenuhan kebutuhan hidup seringkali dihambat oleh berbagai faktor, seperti ras, agama, etnis, kelas, dan gender. Rasisme, sebagai contoh, dapat diartikan sebagai sikap, kecenderungan, pernyataan, atau tindakan yang mendukung atau memusuhi kelompok masyarakat berdasarkan identitas ras. Rasisme dianggap sebagai tindakan bodoh karena tidak didasarkan pada pengetahuan apa pun dan bertentangan dengan norma etis, perikemanusiaan, dan hak asasi manusia. Akibatnya, individu dari suku bangsa tertentu seringkali mengalami diskriminasi, penghinaan, penindasan, dan bahkan pembunuhan.

Diskriminasi menunjukkan bahwa manusia sering kali dinilai hanya dari segi penampilan fisiknya, tanpa memandang martabatnya sebagai manusia. Perbedaan warna kulit telah menjadi penyebab konflik, permusuhan, dan bahkan perang. Sulit untuk menerima diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit, karena manusia seharusnya dinilai berdasarkan martabatnya, bukan warna kulit atau ras tertentu. Konsep ini merupakan dasar dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai contoh kasus diskriminasi rasial, pemerintah China melakukan diskriminasi terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah Xianjiang. Upaya integrasi melalui pendidikan politik tidak berhasil, dan migrasi besar-besaran oleh etnis Han menyebabkan ketidaksetaraan

¹¹ Baidhawiy, Zakiyuddin. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, Erlangga, Jakarta 2005, hal.32 dalam James Senduk, Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China), Skripsi, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014). hal.1

dalam kekuasaan dan pengakuan. Etnis Uighur dijadikan kelas dua dan dipekerjakan dalam pekerjaan rendahan, sementara etnis Han mendapatkan jabatan tinggi. Pemberontakan etnis Uighur diperburuk oleh tindakan represif pemerintah dan ketidakadilan dari individu China keturunan Han.

Etnis Han Pada tahun 1950-an, pemerintah Cina membuat program migrasi etnis ke wilayah Xinjiang, etnis Han dari Cina timur kemudian menerima pekerjaan yang ditugaskan kepada pemerintah (Hak Asasi Manusia di Cina). Sedangkan etnis Uighur yang telah lama tinggal di Xinjiang hanya mencakup penduduk kelas pekerja (pekerja tidak terampil), yakni orang-orang miskin dan berpenghasilan rendah. Program migrasi ini tidak hanya menyebabkan penduduk berpindah tempat, tetapi juga menduduki jabatan pemerintahan. Oleh karena itu, hanya keturunan klan Han yang dapat bekerja di layanan pemerintah.¹² Hal ini sejalan dengan prinsip kerja sama Cina yang hanya memperbolehkan warga negara Cina yang fasih bekerja di lembaga pemerintah

Pengalaman umat Islam sebagai minoritas terjadi sejak awal kemunculan komunitas Muslim di Mekkah, Abessinia, dan Madinah. Meskipun kemudian umat Islam menjadi mayoritas, prinsip Islam tetap menekankan musyawarah antar kelompok dalam masyarakat. Islam mengajarkan agar mayoritas menghargai minoritas dan sebaliknya, agar minoritas tetap diakui dan diberikan kebebasan beragama. Al-Qur'an dan hadis tidak mengenalkan konsep politik mayoritas-minoritas, melainkan mendorong musyawarah dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya mengakui hak-hak umat minoritas dan memberikan kebebasan beragama kepada mereka.

Bertentangan dengan nilai-nilai non-diskriminasi Cina menerapkan pelbagai kebijakan yang mereduksi hak-hak etnis uighur, seperti kebijakan monokultural Cina, yang menganut pendekatan di mana negara hanya mengakui satu budaya, satu jenis pekerjaan, dan satu identitas, telah menciptakan ketidaksetaraan budaya di tengah masyarakat. Prinsip monokulturalisme, yang pada dasarnya menolak keberagaman budaya atau etnis, seolah-olah mengabaikan kekayaan dan keunikan setiap kelompok etnis. Terutama, kelompok etnis Uighur menjadi sasaran diskriminasi karena kebijakan ini tidak mengakomodasi keberagaman budaya dan identitas etnis.

Pemerintah Cina juga melakukan pelarangan kegiatan beragama oleh pemerintah Cina juga memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan beribadah dan identitas keagamaan kelompok etnis, khususnya Uighur, di wilayah Xinjiang. Pembatasan yang ketat terhadap praktik keagamaan, pelarangan kegiatan seperti shalat dan puasa, serta penghancuran masjid-masjid sebagai tempat ibadah, merusak ekosistem keagamaan dan menggiringnya ke dalam dimensi yang lebih terkendali oleh pemerintah. Lebih jauh lagi untuk mencegah agar etnis Uighur tidak semakin berkembang pemerintah Cina melakukan pengendalian kelahiran atau "one child policy," kelompok etnis Uighur mengalami tekanan besar karena dilarang memiliki lebih dari satu anak. Kebijakan ini tidak hanya membatasi pertumbuhan populasi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan budaya yang signifikan. Masyarakat Uighur terbatas dalam

¹² Dinasti Han yang berlangsung selama empat abad. Salah satu dari penggantinya adalah Han Wudi 漢武帝 atau Kaisar Wu (memerintah 141- 87 SM), yang bukan saja merekatkan ideologi Konfusius ke dalam arus utama pemikiran, pemerintahan, dan tatanan sosial Cina saat itu, tetapi juga memasukan sebuah sistem rekomendasi dan nominasi dalam pelayanan pemerintah yang dikenal dengan xiaolian 孝廉 atau kepatuhan dan non-koruptif. Adrianus L.G Waworuntu, "Shenshi Shenshi 紳士 atau Gentr atau Gentry Cina: Sekilas Sejarah dan Profil Kaum Aristokrat Cina pada Zaman Kekaisaran," Paradigma: Jurnal Kajian Budaya 2, no. 2 (2012): 1, 143

hak mereka untuk membangun keluarga sesuai dengan nilai dan norma budaya mereka sendiri.¹³

Tidak hanya pada aspek keagamaan dan keluarga, pengekanagan pemerintah Cina merambah hingga aspek pendidikan. Pembatasan kurikulum pendidikan Cina yang menghapus nilai-nilai dan budaya Turki dari sejarah etnis Uighur menciptakan ketidaksetaraan pendidikan. Kebijakan ini mendorong fokus pada nilai-nilai komunisme Cina sementara menghilangkan warisan budaya dan sejarah khusus etnis Uighur. Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan pengetahuan di antara generasi Uighur, tetapi juga menunjukkan upaya pemerintah untuk mengarahkan pandangan masyarakat kepada narasi tunggal yang sesuai dengan agenda nasional.¹⁴

Selain itu, pemerintah Cina juga menjalankan program pengumpulan DNA adalah program yang digalakkan pemerintah Cina untuk mengumpulkan hasil tes DNA seluruh warga Uighur yang setidaknya terdapat dua belas juta jiwa etnis Uighur di Xinjiang.¹⁵ Tes ini wajib untuk semua warga Uighur tanpa terkecuali. Rangkaian tes tersebut dilakukan dengan mengambil sampel darah, memindai wajah, merekam suara, mengambil sampel sidik jari dan merekam iris mata. Sampel DNA yang diperoleh kemudian diuji dan didaftarkan ke polisi Cina untuk ditautkan ke database populasi Xinjiang. Program pengumpulan DNA ini dapat digunakan oleh pemerintah Cina untuk mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh etnis Uighur di Xinjiang hanya dengan menggunakan gawai.

Terakhir, pemerintah Cina membangaun kamp konsentrasi adalah kamp khusus yang terletak di dekat kota Dabancheng di Cina barat. Pada tahun 2014, pemerintah Tiongkok menciptakan kampanye Serangan Kuat untuk melawan terorisme di Xinjiang. Kampanye tersebut menargetkan orang-orang yang tinggal di Xinjiang, termasuk Uighur, karena mereka dipandang sebagai "ancaman" dan takut mengambil tindakan yang membahayakan dan mengancam keamanan Cina. Tindakan penangkapan secara resmi dilakukan oleh pemerintah Cina dan menahannya di kamp konsentrasi.¹⁶

Penghuni di kamp konsentrasi harus berjalan kaki dan melakukan *push-up* selama kurang lebih 12 jam. Selain itu, etnis yang ditangkap harus bekerja sebagai buruh pabrik di pabrik tekstil yang terletak di area kamp. Pelanggaran lainnya termasuk larangan semua kegiatan keagamaan di kamp, larangan mengenakan jilbab di tempat kerja, larangan membaca kitab suci, dan kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan komunis dan mempelajari nilai-nilai komunisme. Untuk pelanggaran di kamp, mereka dihukum dengan siksaan yang berakhir dengan kematian seseorang.¹⁷

Kebijakan keras pemerintah Cina ini menyinggung Turki, negara yang kerap mendukung kaum Uighur. Faktanya, pada 2018 dan 2019, Cina mengkritik dan memperingatkan Presiden Erdogan untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya, karena Xi Jinping menambahkan bahwa hal itu akan merusak hubungan antara Beijing dan Ankara. Tampaknya benar bahwa pemerintah Cina, yang di sisi lain tidak ingin

¹³ Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah, "Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 10 (Oktober 2020): hal. 1220.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Wee, Sui Lee. (2019). *Cina Uses DNA to Track Its People, With The Help of American Expertise*. New York Times.

¹⁶ Watch, Human Rights. (2015). *Memberantas Virus Ideologis: Kampanye Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang*. HRW Journal.

¹⁷ International, Amnesty. (2018). *Up to One Million Detained in Cina's Mass ReEducation Drive*. Amnesty International

kehilangan wilayah Xinjiang yang bernilai strategis, mengizinkan Cina untuk membenarkan tindakannya dari berbagai sudut pandang, karena Cina juga secara gigih dan berturut-turut memperjuangkan internalnya sendiri. Pemerintah Cina melakukan upaya-upaya propaganda yaitu dengan menerbitkan berbagai kertas putih dan laporan, bahkan menekan media nasionalis Cina seperti *Xinhua News* yang gencar menerbitkan berbagai dalih dari pemerintah Cina.¹⁸

Sebagai perbandingan, Respon Turki terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap minoritas Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok tidak terbatas pada pertimbangan etnis Uighur dan Turki semata, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor kompleks seperti politik domestik, keuntungan ekonomi, dan kondisi internasional. Langkah-langkah verbal Turki mencerminkan respons aktif terhadap situasi ini. Permintaan pertama disampaikan oleh Perdana Menteri Erdogan pada Juli 2009, menyerukan Tiongkok untuk menghentikan diskriminasi terhadap etnis Uighur. Pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Turki, Hami Aksoy, pada Februari 2019, secara tegas mengutuk kebijakan monokultural Cina dan menuntut penghentian doktrin komunisme. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Erdogan ke Tiongkok pada April 2012 lebih mengukuhkan komitmen Turki terhadap kerja sama bilateral.

Selain langkah-langkah verbal, respons Turki juga ditunjukkan melalui aksi non-verbal yang signifikan. Demonstrasi massal di Istanbul pada Juli 2009, yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 orang, merupakan bentuk protes masif terhadap perlakuan terhadap etnis Uighur. Bantuan Turki terhadap pengungsi Uighur pada Juni 2015, dengan menerima mereka secara sukarela, memberikan akses hidup baru dan menetap di Turki. Latihan militer gabungan antara Turki dan Cina pada Oktober 2010 menegaskan komitmen keduanya untuk mempertahankan kerjasama militer, sementara kebijakan anti-Cina, termasuk larangan penggunaan barang dari Cina, menjadi ekspresi nyata dari ketidaksetujuan Turki terhadap tindakan diskriminatif. Keseluruhan, respon Turki terhadap isu etnis Uighur mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan hubungan internasional saat ini. Dalam menghadapi tantangan pelanggaran HAM, Turki menggabungkan pendekatan verbal dan non-verbal untuk mengekspresikan keprihatinan dan menekankan pentingnya menjaga hak-hak etnis minoritas.

Hal itu yang kemudian turut menyeret negara kecil di Asia seperti Indonesia. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Cina yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era reformasi kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapkan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Cina sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Cina. Keberadaan Indonesia sebagai kekuatan menengah didasarkan pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan

¹⁸ Esy Gracia, (2020), Kontrol Media Tiongkok di Era Xi Jinping sebagai Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Global, *The Rise of Midel Power*.

internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan.

Kebijakan Indonesia Terhadap Uighur

Di seluruh wilayah Xinjiang, populasi 13 juta orang Uighur semakin menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, peningkatan pembatasan agama, dan pengawasan yang semakin gila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Human Rights Watch, perkiraan yang dapat diandalkan menyebutkan jumlah Muslim yang dipenjara di kamp-kamp konsentrasi sebanyak satu juta orang. Kampanye "*Smash Hard*" Cina juga melarang warga Uighur menghubungi orang-orang di 26 negara yang bekerja sama, termasuk Indonesia. Mengingat parahnya pelanggaran dan upaya nyata Cina untuk memberantas tradisi Islam, orang akan mengharapkan dukungan kuat Indonesia untuk Uighur berdasarkan solidaritas. Sebaliknya, karena minimnya liputan media, politik dalam negeri, kepentingan ekonomi, upaya diplomasi Cina yang gigih, serta hubungan antara kelompok teroris Uighur dan Indonesia, reaksi Indonesia padam. Pemerintah Indonesia sebagian besar menerima pernyataan Cina bahwa kekerasannya adalah tanggapan yang sah terhadap kerja sama dan terorisme, dan telah memilih untuk memprioritaskan standar non-intervensi daripada solidaritas sebagai sesama muslim.

Presiden Jokowi, dalam wawancara dengan Financial Times pada Maret 2019, menyatakan ketidapkahamannya mengenai situasi di Xinjiang, sambil menyuarakan keprihatinannya terhadap isu tersebut, sejajar dengan kekhawatiran terhadap masalah di Negara Bagian Rakhine. Beliau mengingat kunjungannya ke Cox's Bazaar dua tahun sebelumnya, di mana beliau menyaksikan kondisi yang sangat buruk dari satu juta pengungsi di Bangladesh. Jokowi juga berbagi pembicaraannya dengan Aung San Suu Kyi mengenai isu tersebut, menunjukkan perhatian Indonesia terhadap permasalahan tersebut.¹⁹

Dalam konteks politik domestik, isu Uighur semakin terpolitisasi pada akhir 2018, seiring dengan kampanye pemilihan presiden dan parlemen Indonesia tahun 2019. Politisasi ini mempengaruhi respons Indonesia, terutama di kalangan kelompok masyarakat sipil yang mendukung Uighur, terutama kelompok Muslim yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto, rival Jokowi. Dalam kampanye pemilu 2014 dan 2019, Prabowo dan pendukungnya berupaya merendahkan Jokowi dengan menyebarkan isu bahwa Jokowi adalah keturunan Tionghoa, komunis, dan Kristen, untuk memobilisasi sentimen anti-Cina, anti-Komunis, dan anti-Kristen.

Pada Desember 2018, ketika kelompok Muslim merencanakan protes di luar Kedutaan Besar Cina untuk menunjukkan solidaritas dengan Uighur, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada Duta Besar Cina Xiao Qian mengenai laporan pelanggaran HAM terhadap Uighur. Duta Besar meyakinkan bahwa Cina hanya peduli terhadap terorisme dan ekstremisme, sementara pemerintah Indonesia berada dalam dilema, berusaha mendukung Uighur tanpa merusak hubungan dengan Cina atau memperburuk kampanye politik dalam negeri. Pemerintah Jokowi, sambil tidak ingin membahayakan investasi Cina yang vital bagi rencana ekonominya, dihadapkan pada dilema dalam menanggapi isu Uighur. Kantor

¹⁹ Jamil Anderlini dan Henny Sender, "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls," Financial Times, Maret 18, 2019, <https://www.ft.com/content/9831c394-46ed-11e9-b168-96a37d002cd3>.

kepresidenan lebih memprioritaskan dampak kampanye politik, sementara Kementerian Dalam Negeri berfokus pada kepentingan nasional yang lebih luas. Hasilnya, respons Indonesia mencerminkan keseimbangan rumit antara dukungan terhadap hak asasi manusia dan pertimbangan politik serta ekonomi.

Keheningan terhadap isu Uighur oleh kelompok-kelompok Muslim seperti NU dan Muhammadiyah menciptakan kebingungan, namun dapat dijelaskan oleh pertimbangan politik dalam negeri maupun diplomasi publik Cina. Di satu sisi, kepentingan untuk menghindari dukungan terhadap kelompok Islamis di kubu Prabowo membuat NU, yang menduduki posisi sentral dalam koalisi Jokowi, berhati-hati. Sementara itu, Muhammadiyah, yang menghadapi perpecahan internal, memiliki beberapa kelompok yang terlibat dalam demonstrasi solidaritas Uighur pada 20 Desember 2019. Pernyataan hati-hati yang dikeluarkan Muhammadiyah sehari sebelumnya menyerukan solidaritas Muslim dan menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal serta nilai-nilai Indonesia. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa jika laporan kekerasan terhadap Uighur benar, Cina telah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh PBB, dan bahwa penggunaan kekerasan Cina terhadap orang yang lemah dan tidak bersalah yang harus dilindungi, tidak dapat disetujui.²⁰ Lebih lanjut, Muhammadiyah menghimbau kepada pemerintah Cina untuk terbuka dalam memberikan informasi faktual untuk mengurangi ketergantungan pada laporan yang meragukan, dan untuk bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi masalah tentang perlakuan tidak manusiawi. Ketiga, Muhammadiyah mendesak PBB dan OKI mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah Uighur. Keempat, Muhammadiyah meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi sesuai dengan prinsip kebijakan “bebas aktif” untuk menciptakan perdamaian dunia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan. Kelima, menyerukan solidaritas Muslim dan pendekatan kemanusiaan yang telah diadopsi terhadap Uighur, Muhammadiyah mengimbau masyarakat Indonesia untuk berdiri dalam solidaritas dengan Uighur dan menyatakan siap menawarkan bantuan kemanusiaan dan materi untuk Uighur.²¹

Alasan Pemerintah Indonesia Tidak Meningkatkan Tindakannya Dalam Kasus Etnis Uighur

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) pada periode Agustus 2019, disebutkan bahwa ULN (Utang Luar Negeri) menurut pemberi kredit yang berasal dari Cina berjumlah sebesar US\$ 16,99 miliar atau setara dengan Rp 239,55 triliun (dengan kurs Rp 14.100). Hal demikian ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yaitu ketika utang luar negeri Indonesia yang dihitung berdasarkan pemberi kredit dari Cina hanya berjumlah Rp 238,71 triliun.²² Berdasarkan hal ini dapat dicermati bahwa Cina semakin merambah ruang besar untuk menjadi kreditur di Indonesia, yang tidak lain dari hal tersebut Cina berupaya agar beragam kerjasama dapat lahir dari bantuan kredit atau pinjaman tersebut.

Lebih lanjut, dari data SULNI diketahui posisi ULN Cina sebenarnya hanya berada di urutan keempat dengan urutan pertama ULN Singapura sebesar 66,46 miliar

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Detik, Daftar Lengkap Utang RI ke Cina, <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d4752167/daftar-lengkap-utang-ri-ke-Cina> Diakses pada 16 Maret 2023

USD, disusul Jepang sebesar 29,36 USD. Sedangkan Amerika Serikat dengan \$22,54 miliar. Lebih lanjut, data SULNI juga menyebutkan total utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2019 mencapai US\$393,5 miliar atau Rp5.548,35 triliun, atau utang dari gabungan swasta dan swasta serta pemerintah. Hal ini sebenarnya hanya naik 8,7% dari tahun ke tahun atau kurang dari tingkat pertumbuhan 10,9% bulan sebelumnya.²³ Utang luar negeri Cina utamanya berasal dari dalam negeri, meskipun Cina sendiri berada di peringkat ke-4 setelah Singapura, Jepang, dan AS dalam jumlah utang luar negeri. Walaupun begitu, fokus utamanya nampaknya adalah meningkatkan nilai pinjaman dari kreditur Cina, menjadikan Cina sebagai sumber pinjaman yang penting bagi Indonesia.

Di awal tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly juga menerima Duta Besar Cina untuk Indonesia H.E. Xiao Qian dan rombongannya. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas hubungan bilateral Cina dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, serta harapan baru di tahun 2020.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Cina berkomitmen untuk memperkuat hubungan yang terlihat dari evaluasi di masa lalu, dan juga merupakan langkah mundur agar kedepannya dapat mendorong implementasi hubungan bilateral yang lebih baik.

Menkumham mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berharap akan ada penyelesaian yang tepat mengenai aspek universal HAM di wilayah Xinjiang, namun demikian Menkumham menegaskan bahwa Indonesia tidak berniat ingin atau mencampuri urusan dalam negeri Cina. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibayangkan bahwa bahasa atau gaya diplomasi yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut, memiliki pengertian yang halus bahwa Indonesia tidak ingin mencemari kebijakan luar negeri dan persahabatan dengan Cina, meskipun Cina saat ini sedang mengalami gejolak di negaranya sendiri. Mengenai keseluruhan data yang diperoleh pada bagian ini, dapat ditarik beberapa benang merah yaitu hubungan Indonesia-Cina semakin erat, bahkan dalam konteks pandemi dengan ketidakpastian, Cina dan Indonesia semakin berjanji untuk saling mendukung dan memperkuat kegiatan usaha di berbagai bidang.

Adapun untuk bidang yang tergabung dalam proyek kemitraan strategis tersebut seperti industri, yaitu dimana kedua negara melakukan operasi industri gabungan dengan cara membangun fasilitas produksi Wuling Motors di Indonesia. Begitu juga dengan Cina yang semakin merambah proyek infrastruktur menyusul tingginya kebutuhan transportasi di Indonesia, seperti pembangunan taman dan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, kemitraan strategis di bidang wisatawan, Cina juga menjadi pemegang peran penting bagi meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia, dan sebaliknya Indonesia juga semakin ingin menjadikan Cina sebagai negara tujuan beasiswa kedua terbesar bagi mahasiswa Indonesia.²⁵ Berdasarkan hal ini dapat dimengerti begitu luasnya bidang yang dirambah

²³ *Ibid.*

²⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Awali Tahun 2020, Duta Besar Cina untuk Indonesia Kunjungi Menkumham Bahas Kerjasama Bilateral, <https://www.kemendukham.go.id/berita/awali-tahun2020-duta-besar-cina-untuk-indonesia-kunjungimenkumham-bahas-kerja-sama-bilateral> Diakses

²⁵ SindoNews, Indonesia dan Cina Perkuat Kerjasama, <https://internasional.sindonews.com/berita/1303673/4> o/indonesia-dam-cina-perkuat-kerjasama?showpage=all

atas nama kerjasama kedua negara.

Kesesuaian Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dengan Siyasa Dauliyah

Dalam tindakan ini, Presiden Jokowi telah mengusahakan hak yang seharusnya didapatkan oleh umat Islam termasuk pengungsi dari Etnis Uighur yaitu hak untuk mendapatkan keadilan (Q.S Asy- Syura : 15), hak atas persamaan status (Q.S Al- Baqarah: 286), hak kebebasan beragama (Q.S Al- Baqarah 256) dan hak-hak lainnya.

No.	Hukum Islam	Kebijakan Indonesia
1	Mengadakan perjanjian hubungan antar negara mengenai penyelesaian suatu konflik di negara tersebut. (Perjanjian Hidaybiyyah)	Mengadakan hubungan diplomasi bilateral dengan negara Cina terkait Konflik Etnis Uighur (UU No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.)
	<p>Melindungi Hak Asasi Manusia</p> <p>a. Hak hidup (Q.S. Al- Isra : 33, Q.S Al- An'am : 151)</p> <p>b. Hak atas persamaan dan status (Q.S Al- Baqarah : 286) dan hak mendapatkan keadilan (Q.S Asy – Syura : 15)</p> <p>c. Hak kebebasan beragama (Q.S Yunus :101)</p> <p>d. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia (Q.S Adz- Dzariyat: 19)</p>	<p>Melindungi Hak Asasi Manusia</p> <p>a. Memberikan pertolongan kepada pengungsi, baik berupa pemberian makanan maupun tempat tinggal atau penampungan. (Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri). Namun, Memberikan pertolongan kepada pengungsi etnis Uighur melibatkan pertimbangan kemanusiaan, diplomatik, sosial, dan keamanan. Aspek kemanusiaan menekankan perlunya memenuhi hak dasar pengungsi, seperti akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan fasilitas penampungan. Sementara itu, pertimbangan diplomatik mencakup dampak hubungan bilateral dengan negara asal pengungsi, Cina. Pengintegrasian pengungsi Uighur ke dalam masyarakat setempat dan upaya mencegah konflik sosial menjadi pertimbangan sosial yang penting. Terakhir, aspek keamanan melibatkan identifikasi dan penanganan potensi risiko keamanan yang terkait dengan penerimaan dan bantuan kepada pengungsi etnis Uighur, termasuk potensi ancaman ekstremisme. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kebijakan pemberian pertolongan dapat dirancang untuk mencapai keseimbangan yang tepat</p>

		<p>antara kemanusiaan, diplomasi, integrasi sosial, dan keamanan.</p> <p>b. Indonesia bersama PBB dan negara lainnya mendesak Cina untuk memberikan kewarganegaraan kepada Etnis Uighur.</p> <p>c. Perpres No. 125 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pengungsi berdasarkan aspek agama dan lain-lain (pasal 25e), dan dekat dengan tempat ibadah (Pasal 26 ayat (2)) - Fasilitas kebutuhan dasar bagi pengungsi berupa tempat ibadah (pasal 26 ayat (5d) <p>Dalam hal kebebasan beragama, hanya sebatas 6 agama yang diakui oleh Indonesia</p> <p>Memberikan kebutuhan dasar bagi pupa penyediaan air bersih, makan, minum, pakaian, pelayanan kesehatan dan kebersihan, dan fasilitas ibadah. (Pasal 26 ayat (4) dan (5) Perpres No. 125 tahun 2016)</p>
--	--	--

PENUTUP

Di era demokrasi Indonesia, Islam memainkan peran yang semakin penting dalam politik luar negeri Indonesia. Unsur Islam terlihat jelas dalam upaya memperjuangkan hak-hak muslim di luar negeri, karena ini merupakan isu yang berimplikasi penting bagi pemilih nasional. Namun, solidaritas Muslim tidak serta merta diterjemahkan ke dalam kebijakan profil tinggi untuk menyuarakan dukungan bagi penderitaan minoritas Muslim di luar negeri. Di sisi lain, seperti yang diilustrasikan oleh kasus Uighur, komitmen terhadap aturan non-interferensi menimbulkan hambatan yang signifikan untuk melindungi kepentingan umat Islam di luar negeri. Sebagai negara yang telah menghadapi banyak konflik separatis, teroris, dan sektarian agama selama dua dekade demokrasi, Indonesia sangat memahami kompleksitas konflik tersebut dan sangat percaya bahwa tekanan eksternal dapat memperburuk keadaan. Pengalaman ini membuat Indonesia memilih pendekatan yang tenang untuk melibatkan pejabat pemerintah daripada mendorong dengan keras dan menonjol

karena Pemerintah yakin bahwa perubahan politik di lapangan hanya akan datang dari dalam.

Pada hal ini juga dapat dipahami bahwa diplomasi lunak ini ialah bentuk tindakan yang menjauhi tindakan konfrontatif. Sejalan dengan perspektif behavioralisme yang menekankan tindakan dan reaksi dalam Hubungan Internasional, dapat disimpulkan bahwa tindakan konfrontatif atau akomodatif suatu negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh keseimbangan power dan kapabilitas internasional. Negara yang memiliki power dan kapabilitas seimbang cenderung melakukan tindakan konfrontatif, sementara negara dengan power lebih kecil mungkin akan bersikap akomodatif untuk mengakomodir kepentingan negara besar. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa dinamika ini dapat berubah seiring waktu dan pergeseran kekuatan internasional, menciptakan dinamika hubungan yang kompleks dan terus berkembang dalam arena global.

Daftar Pustaka

- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Kencana.
- CNN Indonesia, Riva Dessthania Suastha, "ISIS Uighur: Darah Bakal Mengalir di Sungai Cina," (<https://m.cnnindonesia.com/internasional/20170303130505-113-197586/isis-uighur-darah-bakal-mengalir-di-sungai-cina>), Diakses pada 15 Maret 2023.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feillard, A. (1999). *NU Vis a Vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk Dan Makna*. LKiS Pelangi Aksara.
- Firsty Adinda Putri and Gonda Yumitro, "Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang," *Balcony: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Budi Luhur*, 1(6), [15-22], Tautan.
- Gita Karisma, "Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara Cina Terhadap Keutuhan Wilayah," *Jurnal Sosiologi*, Volume 19, No. 1, hal. 44.
- Gracia, Esy. (2020). *Kontrol Media Tiongkok di Era Xi Jinping sebagai Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Global, The Rise of Midel Power*.
- Hidayat, Muhammad Nizar. (2013). "Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina." *Interdependence Journal*, 1, 3.
- Human Rights Watch, "Memberantas Virus Ideologis: Kampanye Represi Tiongkok Terhadap Muslim Xinjiang," 2015.
- Jamil Anderlini dan Henny Sender, "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls," *Financial Times*, Maret 18, 2019, (<https://www.ft.com/content/9831c394-46ed-11e9-b168-96a37d002cd3>)
- Muhammad Saeri, "Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik," Universitas Riau: *Jurnal Transnasional* Vol. 3, No. 2, 2012, hal. 12-13.
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pidato di Islamic University of Iman Muhammad Bin Sa'ud, Riyadh, Saudia Arabia. (<https://ex.kemlu.go.id/en/pidato/presiden/Pages/Remarks-By-H-Dr.H.Susilo-BambangYudhoyono-President-of-the-Republic-of-Indonesia-at-Islamic-Un.aspx>), diakses pada 15 Maret 2023.
- Senduk, James. "Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Studi Kasus: Diskriminasi Rasial Terhadap Etnis Uighur Di China)." Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2014.
- SindoNews, "Indonesia dan Cina Perkuat Kerjasama," [Tautan](<https://internasional.sindonews.com/berita/1303673/40/indonesia-dam-cina-perkuat-kerjasama?showpage=all>).
- Sukma, Rizal. (2004). *Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia*. London: Routledge.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam(Siyasah Dauliyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tempo.co, "Mengapa Pemerintah Negara Muslim, Termasuk Indonesia Diam Soal Uyghur?," (<https://www.tempo.co/abc/3377/mengapa-pemerintah-negara-muslim-termasuk-indonesia-diam-soal-uyghur>), Diakses pada 15 Maret 2023.

- Wee, Sui Lee. (2019). *Cina Uses DNA to Track Its People, With The Help of American Expertise*. New York Times.
- Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonim, "Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), Oktober 2020, 1217.